



## Analysis of Segmentation, Targeting and Positioning Strategies in Fraud Risk and Their Impact on Organizational Potential Consequences in Achieving Organizational Goals

Mohammad Firlie Pranata<sup>1\*</sup>, Unsul Abrar<sup>2</sup>, Amirul Fatoni<sup>3</sup>  
Universitas Wiraraja

**Corresponding Author:** Mohammad Firlie Pranata

[Moh.firlipranata@wiraraja.ac.id](mailto:Moh.firlipranata@wiraraja.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Fraud, Corruption, Strategy, Finance

*Received :* 05, September

*Revised :* 21, October

*Accepted:* 19, November

©2022 Pranata, Abrar, Fatoni: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Data compiled by Indonesian Corruption Watch shows that during 2016, there were 482 corruption cases with a total state loss of IDR 1.47 trillion (Indonesian Corruption Watch 2017). International Transparency in a 2016 survey showed Indonesia ranked 90th out of 176 countries measured by the level of corruption with a score of 37 (Transparency International 2016). Reform in the field of state finances has been implemented through a package of laws consisting of UUD No. 17 of 2003 concerning State Finance, UUD no. 1 of 2004 concerning the State Treasury and UUD no. 15 of 2004 concerning Examination of State Financial Management and Responsibility. The implementation of the Segmentation, Targeting and Positioning (STP) strategy can be used as a "lubricant" and an exit strategy in mitigating and preventing the occurrence of fraud risk. more optimal.

---

## **Analisa Strategi Segmentasi, Targeting dan Positioning dalam Fraud Risk dan Pengaruhnya terhadap Konsekuensi Potensial Organisasi dalam Pencapaian Tujuan Organisasi**

Mohammad Firlie Pranata<sup>1\*</sup>, Unsul Abrar<sup>2</sup>, Amirul Fatoni<sup>3</sup>

Universitas Wiraraja

**Corresponding Author:** Mohammad Firlie Pranata

[Moh.firlipranata@wiraraja.ac.id](mailto:Moh.firlipranata@wiraraja.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Fraud, Korupsi, Strategi, Keuangan

*Received :* 05, September

*Revised :* 21, October

*Accepted:* 19, November

©2022 Pranata, Abrar, Fatoni: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Data dihimpun Indonesian Corruption Watch menunjukkan selama tahun 2016, terdapat 482 kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp 1,47 Triliun (Indonesian Corruption Watch 2017). Transparansi Internasional dalam survey tahun 2016 menunjukkan Indonesia peringkat 90 dari 176 negara yang diukur tingkat korupsinya dengan skor 37 (Transparency International 2016). Reformasi dibidang keuangan negara telah dilaksanakan melalui paket Undang-Undang yang terdiri dari UUD Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UUD No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UUD No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Implementasi strategi Segementasi, Targeting dan Positioning (STP) dapat dijadikan “pelumas” dan exit strategy dalam memitigasi dan mencegah terjadinya risiko fraud kombinasi pelaksanaan dan penanaman budaya organisasi, kepemimpinan, pelaksanaan SPIP memadai, efektif serta identifikasi manajemen risiko mempermudah akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi lebih optimal.

---

## PENDAHULUAN

Organisasi merupakan bangun dan model sistem yang teridentifikasi melalui mekanisme kerja yang terstandar dari berbagai subsistem untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dibentuk memiliki tujuan yang berbeda baik organisasi yang bergerak di sector public maupun organisasi yang sifatnya profit oriented. Implementasi organisasi dalam mencapai tujuannya seringkali dan pasti berhubungan dengan organisasi lainnya baik secara pribadi maupun kelembagaan yang bersifat administrative atau mungkin dalam pengambilan keputusan organisasi secara jangka pendek maupun jangka panjang. (Budaya Organisasi, Taliziduhu Ndraha : 2003). Keterkaitan dan pola hubungan paternalistic organisasi dengan organisasi lainnya berkaitan dengan keputusan rutin dan keputusan strategis yang terkadang dalam pelaksanaannya terdapat benturan kepentingan dan resiko - resiko rasionalisasi personal setiap pengambil keputusan. Terhadap fenomena dan permasalahan tersebut banyak organisasi dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh factor budaya organisasi yang secara sederhana budaya organisasi bisa diartikan sebagai kekhasan, unik dan karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok dalam pencapaian tujuan tertentu.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Data yang dihimpun oleh Indonesian Corruption Watch menunjukkan bahwa selama tahun 2016, terdapat 482 kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp 1,47 Triliun (Indonesian Corruption Watch 2017). Transparansi Internasional dalam surveynya tahun 2016 juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 90 dari 176 negara yang diukur tingkat korupsinya dengan skor 37 (Transparency International 2016). Reformasi dibidang keuangan negara telah dilaksanakan melalui paket Undang-Undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiganya merupakan landasan dan pedoman agar keuangan negara dapat dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengamanatkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Banyaknya aturan tersebut diterbitkan sebagai upaya untuk menekan tingginya kasus kecurangan di Indonesia, namun ternyata belum bisa mengurangi jumlah kasus yang terjadi. Bahkan kecurangan yang melibatkan aparat pemerintah cenderung mengalami peningkatan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan dari tahun 2004 sampai 2016, sebanyak 382 dari 616 pelaku tindak korupsi berdasarkan jabatan/profesi merupakan aparat pemerintah ( Komisi Pemberantasan Korupsi ; 2017).

Untuk itu diperlukan satu langkah sebagai prasyarat pemenuhan standar itu yaitu dengan melakukan pemetaan risiko fraud. Kegagalan dalam memetakan risiko fraud akan memperbesar risiko dimana audit gagal mendeteksi fraud dan membuat simpulan dan rekomendasi yang tidak sesuai

dengan gejala dan kecenderungan masalah. Kendala yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memetakan risiko fraud adalah fraud awareness yang masih rendah dan keterampilan melakukan fraud risk assesment serta keterbatasan waktu dan terbatasnya Sumber Daya Manusia APIP. ( Dr. Hery Subowo, Meniti Maturitas Mengawal Akuntabilitas;2021 )

Budaya dalam suatu organisasi mengidentifikasi suatu aturan yang tertulis dan tidak tertulis terkait, kebiasaan, symbol, asumsi, visi, norma, nilai serta kepercayaan yang akan melibatkan seluruh persepsi, pengalaman, obyektifitas, filosofi, ekspektasi dan juga seluruh harapan anggota organisasi yang terdapat didalamnya sehingga nantinya akan terefleksi dalam kegiatan setiap sikap dan perilaku anggota dalam hal penyelesaian pekerjaan, interaksi dengan lingkungan luar organisasi. Sebuah organisasi membutuhkan aspek manajerial yang dilakukan oleh pemimpin (Leader), kepemimpinan dalam suatu organisasi akan memberikan peranan yang sangat penting dalam hal membentuk budaya dalam organisasi sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu menciptakan, menumbuhkan nilai dan menciptakan model mekanisme kontrol perilaku serta loyalitas anggota organisasi dalam rangka mengkolaborasikan antara organisasi, budaya dengan kepemimpinan yang mampu meminimalisir dan mencegah resiko penyimpangan dengan "Analisa Strategi Segmentasi, Targeting Dan Positioning Dalam Fraud Risk Dan Pengaruhnya Terhadap Konsekuensi Potensial Organisasi Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, organisasi pemerintah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan di dalam sasaran strategis yang harus dicapai. Dalam merealisasikan sasaran strategis untuk mencapai target kinerja utama yang sudah ditetapkan tersebut ada kemungkinan gagal atau tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini disebabkan adanya potensi risiko yang terjadi, sehingga perlu penerapan manajemen risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai.

Untuk memudahkan identifikasi, risiko biasanya diuraikan dalam tiga hal yakni penyebab, peristiwa dan dampak. Ketiga hal tersebut dapat dirangkai dalam kalimat secara sederhana sebagai berikut 'karena terjadi sesuatu (sebab), telah terjadi (peristiwa), sehingga mengakibatkan (dampak pada sasaran). Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan

terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya. Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut. Daya tahan organisasi pemerintah terhadap kemungkinan timbulnya risiko tergantung pada bagaimana mempersiapkan diri secara sistematis terhadap risiko yang harus dihadapi. Kekuatan yang paling mendasar dalam terciptanya budaya risiko (risk culture) dimana sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko, serta menyatukan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya dalam setiap proses bisnis.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan dengan studi kasus deskriptif metode. Menurut Yin (2014), metode memiliki sifat mengekspos dengan tujuan mendapatkan gambaran lengkap tentang peristiwa di tempat-tempat tertentu. Kemudian, metode penelitian ini juga tepat untuk digunakan pada penelitian untuk peneliti yang sudah menerima deskripsi atau data awal tentang masalah yang diteliti. Peneliti memilih bagian dalam informan untuk penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang optimal dan informasi yang akurat untuk menjawab pernyataan masalah dan memenuhi tujuan studi.

Para informan diharapkan mampu berikan jawaban terbaik mereka dan bagikan pengalaman terkait masalah belajar. Pengumpulan data dalam kasus penelitian ini menggunakan triangulasi, yang menggabungkan antara pengamatan, secara mendalam wawancara, dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk datanya.

## **HASIL PENELITIAN**

Pengendalian fraud risk setelah pelaksanaan strategi segmentasi dan targeting diperlukan strategi lanjutan dan sifatnya adalah pengembangan dari strategi sebelumnya yaitu strategi positioning artinya bahwa setelah semua variabel dan indikator sudah teridentifikasi baik itu melalui identifikasi resiko sehingga kita mendapatkan peta resiko, kepemimpinan, pelaksanaan SPIP yang efektif, organisasi sektor publik lebih mudah dalam melaksanakan reposisi atas posisi awal organisasi dengan program dan kegiatan yang memiliki tingkat

kerawanan fraud sehingga terhadap konsekuensi potensial fraud dalam organisasi sektor publik dapat dimitigasi sedini mungkin dengan didukung oleh tata kelola manajemen resikonya. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Menurut Djohanputro (2008) Pengertian Manajemen Risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Bagi organisasi sektor publik, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen risiko diimplementasikan di lingkungan organisasi sektor publik melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Pengembangan budaya sadar risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai organisasi untuk mencapai sasaran organisasi, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko baik bersifat top-down maupun bottom-up, penghargaan terhadap organisasi dan atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik; dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

Implementasi strategi Segementasi, Targeting dan Positioning (STP) dapat dijadikan "pelumas" dan exit strategy dalam memitigasi dan mencegah terjadinya risiko fraud melalui kombinasi pelaksanaan dan penanaman budaya organisasi, kepemimpinan, pelaksanaan SPIP yang memadai dan efektif serta identifikasi manajemen risiko akan mempermudah dalam akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

## **PEMBAHASAN**

Kegagalan dalam memetakan risiko fraud akan memperbesar risiko dimana audit gagal mendeteksi fraud dan membuat simpulan dan rekomendasi yang tidak sesuai dengan gejala dan kecenderungan masalah. Kendala yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memetakan risiko fraud adalah fraud awareness yang masih rendah dan keterampilan melakukan fraud risk assesment serta keterbatasan waktu dan terbatasnya Sumber Daya Manusia APIP. Dr. Hery Subowo, Meniti Maturitas Mengawal Akuntabilitas, 2021

Hal dan point kritis tersebut strategi Targeting - fokus, sasaran menjadi jawaban dan angin segar sebagai pintu masuk dalam upaya meminimalkan dan mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakpatutan dalam tata kelola

pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang salah satu indikator dalam strategi ini adalah melalui implementasi Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah dalam kerangka three lines defense sesuai dengan penjabaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, SPIP dilaksanakan melalui identifikasi risiko yang terdapat dalam pengawasan intern pemerintah yang tercantum dalam kebijakan pengawasan APIP di setiap tahunnya. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Integrasi dan implementasi SPIP dalam konsep pengawasan intern dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi yang utuh berkaitan dengan fraud awareness dan fraud risk assesment sebagai bahan dan strategi APIP dalam mendeteksi dan mengidentifikasi risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) sehingga konsekuensi potensial organisasi terhadap risiko fraud dapat dieliminir untuk pencapaian tujuan organisasi yang lebih optimal, efektif dan berkelanjutan.

Dalam penentuan strategi targeting ini diperlukan daftar awal skema fraud yang harus dimulai dari implementasi SPIP yang memadai dalam operasional organisasi termasuk di dalamnya adalah memetakan resiko-resiko yang sifatnya inherent pada entitas atau proses bisnis organisasi. Terhadap proses bisnis organisasi biasanya terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja OPD sehingga memudahkan dalam melakukan kontrol hubungan dan pengendalian daerah rawan fraud dalam suatu organisasi. Kombinasi pelaksanaan unsur-unsur SPIP sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu Lingkungan Pengendalian; Penilaian Resiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; dan Pemantauan Pengendalian Intern dengan proses dengan melakukan proses identifikasi dan mapping serta pola dan gaya kepemimpinan yang efektif dengan bangun dan model budaya organisasi yang dinamis menerima perkembangan teknologi dan informasi menjadikan sebuah organisasi lebih memiliki kecepatan dalam proses pencapaian tujuan organisasi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, organisasi sektor publik terus berubah dan berkembang mengikuti lingkungan internal dan eksternal. Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal tersebut berpotensi menimbulkan peluang dan risiko bagi organisasi. Peluang dapat

menjadi kesempatan bagi organisasi menuju beberapa tingkat lebih baik sedangkan risiko menjadi sebuah potensi kerugian dan kegagalan. Adaptasi dan upaya mitigasi terhadap resiko harus dilakukan karena secara langsung maupun tidak langsung baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang fraud merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi potensial bagi organisasi dalam membangun harmoni dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing elemen dan subsistem dalam sistem organisasi.

Dalam pengendalian fraud risk, setelah pelaksanaan strategi segmentasi dan targeting diperlukan strategi lanjutan dan sifatnya adalah pengembangan dari strategi sebelumnya yaitu strategi positioning artinya bahwa setelah semua variabel dan indikator sudah teridentifikasi baik itu melalui identifikasi resiko sehingga kita mendapatkan peta resiko, kepemimpinan, pelaksanaan SPIP yang efektif, organisasi sektor publik lebih mudah dalam melaksanakan reposisi atas posisi awal organisasi dengan program dan kegiatan yang memiliki tingkat kerawanan fraud sehingga terhadap konsekuensi potensial fraud dalam organisasi sektor publik dapat dimitigasi sedini mungkin dengan didukung oleh tata kelola manajemen resikonya. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Menurut Djohanputro (2008) Pengertian Manajemen Risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Bagi organisasi sektor publik, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen risiko diimplementasikan di lingkungan organisasi sektor publik melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Pengembangan budaya sadar risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai organisasi untuk mencapai sasaran organisasi, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko baik bersifat top-down maupun bottom-up, penghargaan terhadap organisasi dan atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik; dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

Implementasi strategi Segmentasi, Targeting dan Positioning (STP) dapat dijadikan "pelumas" dan exit strategy dalam memitigasi dan mencegah terjadinya risiko fraud melalui kombinasi pelaksanaan dan penanaman budaya organisasi, kepemimpinan, pelaksanaan SPIP yang memadai dan efektif serta

identifikasi manajemen risiko akan mempermudah dalam akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Manajemen risiko di sektor publik melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Pengembangan budaya sadar risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai organisasi untuk mencapai sasaran organisasi, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko baik bersifat top-down maupun bottom-up, penghargaan terhadap organisasi dan atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

Strategi Segementasi, Targeting dan Positioning dalam Implementasi dapat dijadikan “pelumas” dan exit strategy dalam memitigasi dan mencegah terjadinya risiko fraud melalui kombinasi pelaksanaan dan penanaman budaya organisasi, kepemimpinan, pelaksanaan SPIP yang memadai dan efektif serta identifikasi manajemen risiko akan mempermudah dalam akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka diharapkan adanya penelitian selanjutnya tidak hanya tentang Analisa Strategi Segmentasi, Targeting Dan Positioning Dalam Fraud Risk Dan Pengaruhnya Terhadap Konsekuensi Potensial Organisasi Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi, tapi ditambah lagi terkait faktor fraud yang lainnya yang mana hal tersebut juga ikut dalam memperngaruhi adanya fraud risk yang saling berhubungan dan hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya fraud risk tidak hanya di sektor publik saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dr. Hery Subowo (2021); Meniti Maturitas Mengawal Akuntabilitas Audit Sektor Publik dalam Perspektif Praktik

Kementerian Keuangan RI, 2019 tentang Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sondang P Siagian (2016); Teori dan Praktek Kepemimpinan

Taliziduhu Ndraha (2003); Budaya Organisasi Djohanputro (2008); Manajemen Resiko Organisasi